

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional saat ini mengalami perkembangan dan menunjukkan peningkatan kemajuan. Hal ini tidak terlepas dari pendapatan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Sehingga dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat ini mau tidak mau mempengaruhi pula pertumbuhan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh masyarakat. Peningkatan pembangunan nasional dewasa ini, ditandai oleh munculnya berbagai kemajuan di sektor-sektor industri sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan dapat memberi manfaat besar dalam memperluas kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tuntutan akan pembangunan yang membawa ke situasi yang lebih baik, merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan masyarakat yang selalu ditandai dengan adanya perubahan. Perubahan sosial merefleksi proses transformasi, ada perubahan sosial yang meliputi institusi tertentu termasuk juga hubungan diantara institusi tersebut.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Publik memainkan sejumlah peran pentingnya. Peran Administrasi Publik adalah menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara, yakni kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam sebuah organisasi seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidangnya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai dengan porsi, objek, serta bersifat terus menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan jangka waktu penyelesaian relatif singkat. Pentingnya pelaksanaan tugas oleh aparatur pemerintahan ini sejalan dengan bunyi pasal 3 ayat (1) UU No. 53 tahun 2010 tentang perubahan atas UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok kepegawaian yang menyebutkan bahwa : “Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas, pemerintahan, dan pembangunan”.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu kiranya tersedia aparatur yang profesional. Hal ini merupakan salah satu prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Organisasi pemerintahan senantiasa akan berupaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan tanggung jawabnya salah satu upaya pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Pada konteks tersebut, pendekatan kebijakan pengelolaan sumber daya

manusia (SDM) berbasis pada perkembangan pengetahuan merupakan salah satu pilar penting, karena kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dapat dipandang sebagai pendekatan baru secara komparatif terhadap kebijakan pengelolaan manajemen personalia yang memandang manusia sebagai sumber daya kunci

Salah satu sumber daya yang penting bagi manajemen ialah manusia yang berkedudukan sebagai manajer dan pegawai / karyawan / buruh atau pekerja. Sumber daya ini lah yang diberi nama baru yang sangat populer dewasa ini dengan nama sumber daya manusia (SDM) atau Human Resources dan untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi (*Organizational survival*), setiap organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan. Organisasi birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatang adalah yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan memiliki berbagai keterampilan serta keahlian.

Salah satu sumber organisasi yang paling penting adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Namun dalam realisasinya, kondisi tersebut tidaklah mudah terbentuk dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan masih banyak aparatur pemerintah yang sering terjebak dalam kegiatan rutin birokrasi. Mereka kurang responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik serta lemah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Keadaan yang terjadi ketika tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan meningkat, tidak diikuti oleh peningkatan ketrampilan dan keahlian. Masih sering dijumpai pelayanan aparatur dengan prosedur berbelit-belit, tidak adanya kepastian dan kurang transparan.

Di dalam struktur organisasi ditetapkan tugas-tugas dari masing-masing orang yang digariskan secara jelas dan batas-batas tugas antara orang yang satu dengan yang lain juga jelas, sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam melaksanakan tugas tersebut. Pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan itu diatur dengan jelas sehingga seorang pimpinan atau pegawai akan mengetahui siapa yang harus melapor kepadanya dan kepada siapa dia harus melaporkan tugasnya. Para karyawan yang tidak menduduki jabatan pun akan mengerti tugas apa yang harus dilakukannya, apa batas-batas tugasnya, bagaimana hubungan tugasnya dengan orang lain, sehingga merasa sama-sama bertanggung jawab dalam pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target ataupun sasaran yang telah ditetapkan, sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi ke arah yang telah ditetapkan. Hasil dari pengorganisasian itu adalah terciptanya kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana yang ditentukan semula. Dalam menjalankan suatu organisasi perlu juga kiranya diperhatikan peningkatan semangat kerja organisasi. Disamping ini dapat juga diketahui bahwa tujuan utama dari setiap organisasi pada hakikatnya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi itu sendiri.

Persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Mendengar istilah *Sampah* pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita,

terbayang dan terlintas dalam benak kita berupa tumpukan barang limbah yang tidak sedap dilihat serta ber aroma busuk menyengat.

Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu Kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang dibuang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir. Kelompok pertama yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan sampah yang efektif, efisien dan terjangkau. Berdasarkan sumbernya sampah terbagi menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Sedangkan menurut sifatnya sampah dibagi menjadi dua yaitu;

- 1) Sampah organik atau sampah yang dapat diurai (*degradable*) contohnya daun-daunan, sayuran, sampah dapur dll.
- 2) Sampah anorganik atau sampah yang tidak terurai (*undegradable*) contohnya plastik, botol, kaleng dll.

Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah zat kimia, energy atau makhluk hidup yang tidak mempunyai nilai guna dan cenderung merusak. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk

yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase/materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam fase cair dan gas, terutama dalam fase gas sampah ini disebut sebagai emisi berkait dengan polusi. Bila sampah masuk kedalam lingkungan (ke air, keudara dan ketanah) maka kualitas lingkungan akan menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang dikenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan. Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu Kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang dibuang kesungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir. Kelompok pertama yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan system pengolahan sampah yang efektif, efisien dan terjangkau.

Setiap manusia menginginkan hidup yang sehat aman tentram dan damai, sehingga setiap manusia menginginkan yang ada di sekelilingnya aman sehat tentram dan nyaman. Namun yang terjadi semakin bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan volume jenis sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode tehnik pengumpulan di TPS, pengangkutan dari TPS dan pengolahan diTPAS.

Usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau

dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

Pemerintahan Kabupaten Kampar peran institusi dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan mengenai pengelolaan kebersihan. Khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Khususnya dalam melaksanakan pengelolaan dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam penanganan masalah sampah dengan menerapkan program antara lain :

1. Buang sampah pada tempatnya
2. Lakukan gerakan 3R
 - *Reduce* (Mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah)
 - *Reuse* (Kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung)
 - *Recycle* (Memamfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengelolaan)
3. Pilah sampah berdasarkan jenisnya untuk mempermudah didaur ulang

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 - Kasi Kajian Dampak Lingkungan
 - Kasi Pemeliharaan Lingkungan
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
 - Kasi Penanganan Sampah
 - Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah
- c. Kepala Bidang pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kasi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kasi pencemaran dan Limbah
- d. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - Kasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar diatas dalam mengatasi permasalahan sampah yang mempunyai peranan yaitu Bidang Pengelolaan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan sampah yang terdiri dari Kasi Penanganan Sampah dan Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah dan Kebersihan mempunyai tugas di bidang antara lain :

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Pengawasan
- 4) Penyapuan
- 5) Pengumpulan,
- 6) pengangkutan pengelolaan sampah

Untuk melihat fungsi pada Bidang Pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, fungsi :
 - a) Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undang dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - c) Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar cepat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan;

- d) Merencanakan pengumpulan dan kebersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta
 - e) Melaksanakan pengangkutan sampah ketempat pengelolaan akhir sampah dan pengangkutan tinja ketempat pembuangan;
 - f) Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang penanganan sampah;
 - g) Membuat data dan menghitung kubikasi timbunan sampah dilokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) setiap hari sesuai dengan pengolahan sampah
 - h) Melaksanakan sistem penampungan dan pemanfaatan sampah
 - i) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintahan daerah provinsi dan instansi terkait dalam pengelolan kebersihan/persampahan
 - j) Merencanakan dan melaksanakan, menginventarisir pemilihan jenis sampah setiap hari
 - k) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA
 - l) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
2. Kasi Penanganan Sampah, melaksanakan tugas/fungsi :
- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Kasi pengelolaan sampah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

- b) Melaksanakan kebersihan dan pengumpulan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta;
 - c) Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen kerja;
 - d) Menyiapkan bahan serta memberikan layanan dalam rangka penanganan sampah
 - e) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bidang Pengelolaan Sampah dan melaksanakan tugas –tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah;
3. Kasi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah, tugas :
- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan; sampah dan penyuluhan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Menginventarisir kegiatan dan permasalahan yang dihadapi;
 - c) Melaksanakan system penampungan dan pemanfaatan sampah;
 - d) Merencanakan pelaksanaan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA;
 - e) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - f) Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah;

Dinas Lingkungan Hidup Kampar Kabupaten dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan sampah yaitu:

1. Keterkaitan

- a. Badan Pendapatan Daerah (Bappeda)
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pendidikan
- d. Dinas Pekerjaan Umum
- e. Camat

2. Peringatan

- a. Pengelolaan sampah tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga peran masyarakat dunia usaha dan stake holder lainnya.
- b. Sistem pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan metode Open Dumping sudah di larang sejak 6 mei 2013 sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaansampah.

3. Peralatan/Perlengkapan

- a. Pewadahan (Plastik Sampah, Tong Sampah, Bin Container, TPS,dll)
- b. Alat Angkut (Gerobak Sampah, Pick Up, Truck, Amroll, dll)
- c. Alat Pengolahan Sampah (Sarana pembuatan kompos, mesin pencacah dll)
- d. Pemrosesan Akhir Sampah (Alat berat, Tanah Urug, Landfill, Sarana pengumpulan gas, pengolahan lindi atau leachate, dll)

e. Prasarana dan Sarana Kebersihan (Sapu, Mobil sapu jalan, Vacuum jalan, dll)

f. Alat Pendataan (Jembatan Timbang, dll)

4. Pencatatan dan Pendataan

a. Pengelolaan sampah secara inovatif, efektif dan efisien sangat diperlukan mengingat biaya pengelolaan sampah sangat besar.

b. Pendataan sampah sangat diperlukan dalam perencanaan pengelolaan sampah dan besar dalam menghasilkan atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, maka tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari hari kehari semakin menumpuk. Makin menumpuknya volume sampah tersebut karena adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan di sertai dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang di lakukan juga terus meningkat. Sehingga sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri yang biasa kita kenal sebagai sampah akan bertambah pula.

Timbulan sampah padat tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik. Pembiayaan dalam pengelolaan sampah harus secara efektif dikelola oleh Pemerintah Daerah. Karenapada umumnya, pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar, terutama untuk biaya teknik operasional dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampai di tempat pembuangan akhir.

Dalam pengelolaan persampahan masyarakat harus dilibatkan sebagai pihak utama atau subjek pembangunan. Untuk mengurangi beban pemerintah dalam pengolahan sampah, maka harus dilakukan manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui proses pemilahan sampah sejak dari sumbernya dan daur ulang (*recycling*). Pengurangan sampah langsung dari sumbernya merupakan metode pengelolaan sampah alternatif yang ramah lingkungan disamping mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak dilakukan pengelolaan sampah oleh masyarakat maka semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota diserahkan pada Dinas terkait (dalam hal ini Dinas Kebersihan dan pertamanan) untuk di buang ke TPA. Selain menambah beban volume sampah, hal ini akan menambah beban pemerintah dalam menanggulangi sampah.

Pengolahan sampah menjadi sangat penting karena sangat berpengaruh pada biaya pengolahan. Sampah yang tercampurkan membutuhkan biaya pengolahan yang lebih mahal. Oleh karena kunci dari pengelolaan sampah adalah pemilahan atau pemisahan antara jenis sampah yang satu dengan jenis sampah yang lain. Lalu bagaimana pengelolaan sampah yang berasal dari rumah tangga akan di bahas dalam tesis ini. Dimana dalam proses pengelolaannya masyarakat berperan dalam pengelolaan dan memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik.

Prinsip tata kelola yang baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan dan ketentuan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik yang tidak hanya melibatkan pimpinan semata,

tetapi harus melibatkan system administrasi maupun eksternal administrasi. Dalam pemahaman ini, dalam hal ini pentingnya koordinasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Dari aplikasi ini akan muncul hubungan yang sinergis antara ketiga unsur sehingga terwujud pengelolaan kota yang bersih, nyaman dan damai, serta kehidupan masyarakat yang baik

Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota dan 20 wilayah Kecamatan lainnya yang di atur didalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar baru melayani dalam pengelolaan sampah sekitar 78 % yang ada dikecamatan Bangkinang Kota,selebihnya yang ada dikecamatan lainnya diserahkan kepada camat setempat.

Kecamatan Bangkinang Kota yang merupakan daerah perkotaan yang memiliki jumlah padat penduduk, tingginya aktivitas penduduk di Kecamatan Bangkinang kota secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini, sampah merupakan segala jenis benda buangan atau yang dibuang yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri, maupun proses-proses alam yang berbentuk padat, baik dapat didaur ulang maupun tidak dapat didaur ulang.

Untuk melihat jumlah penduduk dan Jumlah sampah pada tiap tahunnya diKecamatan Bangkinang Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1. Jumlah penduduk dan jumlah sampah yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota.

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampah (Ton)
1	2014	11.967	389.121
2	2015	12.777	360.229
3	2016	12.856	360.450
4	2017	12.929	393.750

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ,2017

Berdasarkan tabel I.1. dapat kita ketahui bahwa Kecamatan Bangkinang Kota pada tahun 2015 sampai 2016 terjadi penurunan sampah. Pada tahun 2016 sampai 2017 jumlah sampah di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan dengan di iringi jumlah jumlah penduduk.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan penanganan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Secara umum, kondisi persampahan di Bangkinang Kota dikatakan cukup baik akan tetapi masih banyak terlihat di daerah trotoar pertokoan, pasar, sekolah dan fasilitas umum lainnya timbunan sampah yang berserakandan tertampung pada tempat pembuangan sampah/tong sementara. Pada dasarnya kebutuhan penyediaan sarana tempat pembuangan sampah atau yang disebut dengan tong atau kontainer sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan hanya saja kondisinya yang sudah banyak yang sudah rusak sehingga sampah yang dibuang oleh masyarakat tidak tertampung di tong sampah karena tong sampahnya banyak yang bolong. Kondisi yang seperti ini yang menyebabkan lingkungan disekitarnya menjadi tidak nyaman dan tidak sehat seperti menyebarkan bau yang tidak sehat, rentan terhadap penyakit, serta pemandangan yang tidak indah. Sistem pengangkutan yang dilakukan petugas kebersihan masih perlu dikaji kembali, dimana masih terjadinya

keterlambatan dalam waktu pengangkutan sampah sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat yang disebabkan terlalu banyaknya sampah yang bertumpuk, belum lagi ditambah dengan bau sampah itu sendiri. Hal ini apabila terus dilakukan, maka semakin lama akan terjadi pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Bangkinang Kota bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar saja akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Camat Bangkinang Kota sebagai pemimpin koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati, walaupun saat ini belum ada juknis dari Bupati Kampar tentang pengelolaan sampah, akan tetapi sangat diperlukan koordinasi dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas tempat/tong pembuangan sampah sementara terhadap Dinas Lingkungan hidup kabupaten kampar.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada

komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dari beberapa gambaran umum diatas berdasarkan survey di lapangan maka ditemukan gejala-gejala/ permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kampar dengan Camat Bangkinang Kota terhadap pengangkutan sampah pada tempat pembuangan akhir
- b. Volume sampah yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana sehingga banyak sampah yang tidak tertampung pada TPS-TPS yang telah disediakan di tempat fasilitas umum seperti pasar, sekolah komplek perumahan yang berada di Bangkinang Kota.
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana ditempat fasilitas umum seperti tong sampah di jalan, TPS-TPS/kontainer yang sudah tidak memadai lagi sehingga banyak terlihat sampah yang berserakan

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami fenomena tersebut melalui penelitian dengan judul ”**Analisis Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar**”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- 2) Faktor- faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan fungsi koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatanpelaksanaan fungsi koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

1.4.Manfaat Penelitian

Dengan dapat diketahuinya gambaran dari variabel-variabel yang ada maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat akademis

Penelitian diharapkan dapat memperdalam kajian teori fungsi koordinasi dan pengelolaan sampah serta untuk pengembangan ilmu administrasi

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tentang pentingnya fungsi koordinasi dan pengelolaan sampah

3) Penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi/rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama.

